

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan salah satu program pembangunan yang berfungsi untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di tingkat perkotaan dan perdesaan yang diluncurkan oleh pemerintah sejak tahun 2007.

Melalui PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis, dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, yang ditumbuhkembangkan, sehingga mereka bukan lagi obyek

melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan (Depdagri, 2008).¹

Pemerintah juga berupaya agar dengan disalurkannya program PNPM ini masyarakat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Program PNPM bukan hanya berkisar pada individu yang miskin tapi program PNPM juga menganggarkan untuk infrastruktur seperti jalan desa dan program fisik lainnya agar akses masyarakat bisa lebih mudah dan dapat terjangkau dengan baik.

Dengan adanya program PNPM, diharapkan individu miskin mempunyai kekuatan (power) dalam memberdayakan kehidupan mereka. Dalam hal pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri, Presiden mengharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena program itu langsung dari usulan masyarakat, sehingga lebih tepat, lebih baik dan tidak ada kebocoran (Kementrian Pekerjaan Umum, 2010).²

Mengingat proses pemberdayaan pada umumnya membutuhkan waktu 5-6 tahun, maka PNPM Mandiri akan

¹ Departemen Dalam Negeri, 2008

² Kementerian Pekerjaan Umum, 2010

dilaksanakan sekurang-kurangnya hingga tahun 2015. Hal ini sejalan dengan target waktu pencapaian pembangunan millennium atau Millennium Development Goals (MDGs). Pelaksanaan PNPM Mandiri yang berdasar pada indikator-indikator keberhasilan yang terukur akan membantu Indonesia mewujudkan pencapaian target-target MDGs tersebut. Untuk itu, melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri diharapkan dapat terjadi harmonisasi prinsip-prinsip dasar, pendekatan, strategi, serta berbagai mekanisme, dan prosedur pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat sehingga proses peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat berjalan lebih efektif dan efisien (Kementerian Pekerjaan Umum, 2010).³

Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaann, PNPM Mandiri Perdesaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan. Sedangkan PNPM Mandiri pedesaann merupakan

³ Kementerian Pekerjaan Umum, 2010

kegiatan lanjutan dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Pedesaan (P2KP) yang dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Penelitian ini difokuskan pada program PNPM Mandiri Pedesaan yaitu partisipasi masyarakat desa untuk bersama-sama merencanakan, melaksanakan program perekonomian ini yang secara prioritas dibutuhkan oleh masyarakat setempat, serta memelihara kelangsungan program tersebut sehingga berkelanjutan. Partisipasi masyarakat dianggap penting karena diduga memiliki hubungan yang kuat dalam mencapai efektivitas program PNPM Mandiri Pedesaan, terutama pada partisipasi dan swadaya masyarakat.

Desa Banaran merupakan salah satu desa di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo yang merupakan lokasi jauh dari pemerintahan daerah. Pada Pelaksanaan program-program PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Banaran yang pada tahun 2010 telah memberikan hasil yang memuaskan.

Dengan adanya program pemerintah ini diharapkan mampu menjadi pembelajaran bagi masyarakat desa dalam melaksanakan proses perencanaan, pembangunan dan pengembangan modal untuk usaha hingga berkelanjutan. Sehingga dari kenyataan diatas, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian mengenai “Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) tahun 2013 Studi Penelitian Di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam program PNPM di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat terhadap Program PNPM Mandiri di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas dapat ditetapkan tujuan penelitian sebagai berikut

1. Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat di desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.
2. Untuk mengetahui faktor partisipasi masyarakat di desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Terkait dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat:

1. Manfaat teoritis
Sebagai sarana perbandingan bagi dunia ilmu pengetahuan dalam memperkaya informasi tentang partisipasi dan swadaya masyarakat tentang PNPM-MP.
2. Manfaat praktik

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan dimasa mendatang khususnya (PNPM-MP).
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah desa khususnya kepala desa Banaran Kabupaten Ponorogo dalam upaya peningkatan kinerjanya dimasa mendatang di bidang kepengurusan (PNPM-MP).

E. Penegasan Istilah

Wahyudi Kumorotomo (1999:112-114) mengatakan bahwa partisipasi adalah berbagai corak tindakan massa maupun individual yang memperlihatkan adanya hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warganya. Secara umum corak partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam:

- (1) Partisipasi dalam pemilihan (electoral participation),
- (2) Partisipasi kelompok (group participation),
- (3) Kontak antara

warga Negara dengan pemerintah (citizen government contacting),

(4) Partisipasi warga negara langsung

F. Landasan Teori

Sebagai titik tolak atau landasan berpikir dalam menyoroiti atau memecahkan masalah perlu adanya pedoman teoritis yang dapat membantu. Landasan teori perlu ditegakkan agar peneliti mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba (trial and error) landasan teoritis (Sugiyono, 2004: 55).⁴

1. Pengertian Partisipasi

Partisipasi adalah keterlibatan secara fisik, mental dan emosi sehingga merasa tergerak untuk berbuat demi kepentingan bersama dalam memikul tanggung jawab (Soepomo, 1992 :22). Sementara itu Kantz (1999: 35) juga berpendapat bahwa partisipasi merupakan salah satu dari enam kelompok input pembangunan, lima lainnya adalah tenaga terlatih, biaya, logistik, fasilitas, informasi, dan legitimasi power.

⁴ Sugiyono, 2004:55)

Terkait dengan hal tersebut di atas, oleh Koentjaraningrat (1996: 36) menjelaskan, masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Berdasarkan pengertian di atas, dapat kita simpulkan bahwa partisipasi masyarakat menuju kepada suatu kegiatan yang sifatnya kesukarelaan.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa keterlibatan *intimidasi dan underpressure* pembangunan sangat tidak relevan konsep partisipasi masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan diperlukan suatu cara atau upaya yang dapat ditentukan untuk merealisasikan kegiatan tersebut, Ndraha (1992: 37), menjelaskan bahwa agar masyarakat tergerak untuk berpartisipasi dalam setiap bentuk kegiatan pembangunan haruslah:

- a. Disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat
- b. Dijadikan stimulan terhadap masyarakat yang berfungsi memotivasi timbulnya respon yang dikehendaki.

⁵ Koentjaraningrat, 1996, Pengantar Ilmu Antropologi, PT Aksara Baru, Jakarta

c. Dengan demikian masyarakat merasa dibutuhkan dan berperan dalam proses pembangunan di wilayahnya sehingga secara spontan dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab mereka berusaha merealisasikan apa yang mereka telah dihasilkan bersama. Namun demikian perlu diperhatikan bahwa betapapun idealnya cara meningkatkan partisipasi masyarakat tersebut, jika tidak disertai dengan pendekatan-pendekatan kemasyarakatan terlebih dahulu, maka hasilnya pun akan sia-sia.⁶

Sehubungan dengan pentingnya pendekatan dalam menggerakkan peran aktif masyarakat, maka perlu adanya teknik pendekatan terhadap masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Teknik pendekatan persuasif yaitu dengan mengadakan perubahan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat.
2. Teknik pendekatan compulsion yaitu dengan mengubah terlebih dahulu tindakan orang-orang atau sekelompok masyarakat.
3. Teknik pendekatan perversion yaitu suatu kegiatan pengulangan secara teratur dan terus menerus sehingga

⁶ Talizuduhu Ndhara, 1992, Dimensi-Dimensi Pemerintah Desa, Ghalia Indonesia, Jakarta

lama kelamaan baik secara perorangan maupun kelompok menjadi sadar untuk mengubah sikap sesuai dengan apa yang dilihatnya dan apa yang diulangi berkali-kali.

2. Bentuk-Bentuk Partisipasi Masyarakat

Berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang diwujudkan atau dilaksanakan oleh masyarakat dalam rangka pelaksanaan pembangunan, ada yang berbentuk pikiran dan ada pula yang berbentuk tenaga. Oleh Tjokroamidjojo (1992) membagi bentuk-bentuk partisipasi sebagai berikut :

1. Partisipasi ide/gagasan
2. Partisipasi keterampilan/keahlian
3. Partisipasi tenaga
4. Partisipasi uang
5. Partisipasi harta benda⁷

Berdasarkan uraian yang disebutkan di atas dikatakan bahwa rakyat pedesaan diperintah untuk berpartisipasi agar menyumbangkan segala apa yang dimiliki guna membangun proyek-proyek pembangunan yang bersifat fisik jika rakyat

⁷ Tjokroaminoto, 1992, Perencanaan Pembangunan, Gunung Agung, Jakarta

dipaksa untuk ikut serta dalam pembangunan maka mereka akan ikut serta dengan terpaksa padahal yang diinginkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan diharapkan atas kesadaran sendiri.

Sehubungan dengan bentuk partisipasi masyarakat yang dipaparkan di atas dalam memikul beban pembangunan oleh F. Cohen dan Uphoff (Soepomo, 1992) berpendapat bahwa pengertian partisipasi banyak ragamnya namun terdapat empat bentuk partisipasi bagi pembangunan pedesaan yaitu :

- a. Partisipasi dalam bentuk pengambilan keputusan
- b. Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan kegiatan
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan
- d. Partisipasi dalam bentuk penilaian serta mengembangkan hasil pembangunan.⁸

Olehnya itu dalam penulisan ini, penulis bermaksud mendeskripsikan keikutsertaan perempuan dalam bentuk partisipasi dalam PNPM Mandiri, maka untuk menjelaskannya mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh F. Cohen dan

⁸ Soepomo, 1992, Pembangunan Masyarakat, CV Karyako, Jakarta

Uphoff (Soepomo, 1992) yang dapat diuraikan sebagai berikut

:

1) Partisipasi dalam bentuk pengambilan keputusan

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dimaksudkan untuk keputusan yang menyangkut rencana desa yang dapat dilihat dari dua aspek yaitu :

- a. Frekwensi menghadiri rapat desa yang khususnya membicarakan masalah rencana pembangunan masyarakat desa.
- b. Tindakan yang dilakukan masyarakat dalam rapat-rapat desa. Tindakan ini dapat berwujud mengikuti jalannya rapat dengan baik, menyumbangkan ide-ide, gagasan, mengajukan usul, atau saran-saran dalam rapat desa, memberikan tanggapan atau kritik terhadap masalah-masalah yang dibicarakan serta ikut memberikan suaranya dalam pengambilan keputusan.

2) Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan kegiatan

Partisipasi dalam bentuk pelaksanaan kegiatan ini dapat dilihat dari dua aspek yaitu :

- a. Keikutsertaan secara langsung dalam pelaksanaan pembangunan misalnya keikutsertaan dalam pembuatan jalan desa, pembuatan pos ronda dan lain-lain.
- b. Keikutsertaan secara tidak langsung tetapi membantu secara sepenuhnya dalam pelaksanaan pembangunan yakni dalam bentuk sumbangan material seperti pasir, batu dan sebagainya serta sumbangan dana (biaya).

3) Partisipasi dalam bentuk memanfaatkan hasil

Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan serta menikmati hasil pembangunan desa yakni :

- a. Ikut serta dalam memanfaatkan fasilitas umum seperti fasilitas sekolah, fasilitas klinik dan sebagainya.
- b. Ikut serta dalam menikmati manfaat secara pribadi seperti merasa puas terhadap hasil pembangunan yang telah tercapai, merasa aman di dalam hidup

bemasyarakat, serta memperoleh kehidupan masa depan yang lebih baik.

4) Partisipasi dalam bentuk penilaian

Partisipasi dalam bentuk penilaian hasil-hasil pembangunan desa dapat dilihat dalam tiga aspek yakni :

- a. Tanggapan masyarakat terhadap tindakan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan dan rumusan keputusan desa.
- b. Tanggapan masyarakat terhadap tindakan pembangunan dengan rencana yang telah ditentukan baik dari segi waktu, biaya, dan tempat.
- c. Keterlibatan dalam menanggapi sesuai tidaknya dengan kebutuhan masyarakat desa.

Soepomo (1992:137), menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan adalah:⁹

a. Faktor Interen

⁹ Soepomo, 1992, *Pembangunan Masyarakat*, CV Karyako, Jakarta

- 1) Adanya kepemimpinan positif yang berpandangan ke depan, yang kongkrit dan bertanggung jawab.
- 2) Adanya pengaruh dan hubungan yang kongkrit antara pemerintah desa dan daerah.
- 3) Adanya bantuan dalam bantuan yang lancar.
- 4) Pemberian penghargaan kepada masyarakat.
- 5) Adanya pembangunan yang terarah dan rapi.
- 6) Adanya kesadaran sosial masyarakat.

b. Faktor Ekstern

- 1) Letak geografis dan adanya komunikasi
- 2) Adanya pengaruh hubungan yang kongkrit antar partisipasi pemerintah daerah dan desa
- 3) Adanya bantuan dalam hal yang wajar
- 4) Pemberian penghargaan kepada masyarakat
- 5) Kompetisi gerak yang sehat dan positif dalam masyarakat

3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Mandiri Pedesaan

Sejak tahun 2007 pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Pedesaan, PNPM Mandiri Perkotaan serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. Program ini adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan dengan pendekatan pembangunan sebelumnya.

PNPM Mandiri Pedesaan pada prinsipnya adalah peningkatan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin pedesaan secara mandiri melalui peningkatan partisipasi masyarakat (terutama masyarakat miskin, kelompok perempuan, dan komunitas/kelompok yang terpinggirkan), meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat dan pemerintah, meningkatnya modal sosial masyarakat serta inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna (Depdagri, 2007).¹⁰

Visi PNPM Mandiri Pedesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar

¹⁰ Dept Dalam Negeri, 2007, *Penjelasan Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan*, Tim Koordinasi PNPM Mandiri Pedesaan. Jakarta

masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya diluar lingkungannya, serta mengolah sumber daya tersebut untuk mengatasi kemiskinan.

Sedang misi PNPM Mandiri Pedesaan adalah :

- 1) Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaan.
- 2) Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif.
- 3) Peningkatan fungsi dan peran pemerintah lokal.
- 4) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sosial dasar ekonomi masyarakat.
- 5) Pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

Dalam rangka mencapai visi dan misi PNPM Mandiri Pedesaan tersebut di atas, strategi yang dikembangkan adalah menjadikan masyarakat miskin sebagai kelompok sasaran, menguatkan sistem pembangunan partisipatif, serta mengembangkan kelembagaan kerja sama antar desa. Berdasarkan visi, misi, dan strategi yang dikembangkan, maka PNPM Mandiri Pedesaan lebih menekankan pentingnya pemberdayaan sebagai pendekatan yang dipilih. Dengan demikian melalui PNPM Mandiri Pedesaan diharapkan

masyarakat dapat menuntaskan harapan pemberdayaan yaitu tercapainya kemandirian dan berkelanjutan, setelah tahapan pembelajaran dilakukan melalui program-program sebelumnya.

Tujuan umum dari PNPM Mandiri Pedesaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di pedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.

Sedangkan tujuan khususnya meliputi :

- a. Meningkatkan kapasitas seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
- b. Melembagakan pengelolaan pembangunan partisipatif dengan mendayagunakan sumber daya lokal.
- c. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- d. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e. Melembagakan pengelolaan dana bergulir.

- f. Mendorong terbentuk dan berkembangnya kerja sama antar desa.
- g. Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan pedesaan.

Keluaran program dalam pelaksanaan PNPM-MP ini adalah sebagai berikut:

- a. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumah Tangga Miskin dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian
- b. Terlembaganya sistem pembangunan partisipatif di desa dan antar desa
- c. Terjadinya peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi masyarakat
- d. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaan bagi masyarakat
- e. Terlembaganya pengelolaan dana bergulir dalam peningkatan pelayanan sosial dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap Rumah Tangga Miskin
- f. Terbentuknya dan berkembangnya kerjasama antar desa dalam pembangunan

- g. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerja sama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan

G. Metodologi Penelitian

1) Jenis Penelitian

Metode kualitatif adalah metode pengambilan data melalui pengamatan di lapangan dimana setiap harinya penulis terlibat didalamnya. Metode interview merupakan metode pengumpulan data melalui wawancara mengenai sekitar materi penelitian. Data dan informasi diperlukan dari hasil wawancara dengan informan secara langsung

2) Penentuan Informan.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah perempuan di desa Banaran yang berpartisipasi langsung dengan PNPM Mandiri Pedesaan, dalam hal ini adalah pengurus PNPM. Selain informan perempuan tersebut di atas, peneliti mengambil informan kunci (*key informan*)

yaitu Kepala desa Banaran dan Sekretaris desa. Penetapan informan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa mereka mengetahui partisipasi perempuan melalui PNPM Mandiri Pedesaan 7 orang adalah sebagai berikut:

No	Nama	Sumber
1	Nur Arifyawanto	Pengurus PNPM
2	Aniati	Pengurus PNPM
3	Harmini	Pengurus PNPM
4	Sarnu	Kepala desa
5	Joko	Sekretaris desa
6	Rina	Masyarakat
7	Hartanto	Masyarakat

3) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian difokuskan di desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo. desa Banaran di pilih karena tingkat partisipasi dan swadaya masyarakat untuk PNPM Mandiri Pedesaan sangat tinggi dan program yang dijalankan oleh PNPM sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Banaran, Kecamatan Pulung.

4) Penyajian dan Analisis Data

Analisa data merupakan bagian yang amat penting, karena dengan data analisa data inilah, data yang dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil. Analisa data adalah proses pengaturan urutan data dan mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan suatu urutan daftar (Milles and Hubberman)

5) Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dari data primer maupun data sekunder metode penelitian yang dipergunakan adalah metode kualitatif. Dimana data-data yang dihimpun, baik primer maupun skunder disusun, dianalisis dan diinterpretasikan kemudian ditarik suatu kesimpulan logis secara induktif sebagai hasil penelitian. Prinsip validitas, objektivitas, dan reliabilitas temuan akan dilakukan melalui cara pengkategorian data dengan sistem pencatatan yang relevan dan melakukan pengecekan atas data yang telah dikumpulkan dengan teknik triangulasi, yaitu melakukan pemeriksaan terhadap sumber lainnya.

Teknik analisis data adalah proses mengatur urutan data, pengorganisasian ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema yang dirumuskan. Data yang terkumpul terdiri dari catatan lapangan, interview, gambar, foto dan dokumen berupa laporan, biografi, artikel, kemudian direduksi dan diolah untuk memperoleh kesimpulan informasi tersebut. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yang kemudian dilakukan reduksi data (menformulasikan teori ke dalam seperangkat konsep) yang dilakukan dengan membuat rangkuman inti dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian ini data dianalisis secara normatif melalui studi literatur dan hasil analisis bersifat kualitatif dalam bentuk deskripsi atau uraian.

Oleh karenanya dengan menerapkan metode analisa yang lazim digunakan dalam penelitian lapangan. Peneliti berpedoman pada tahapan penelitian, bahwa:

- a) Analisis data dalam penelitian lapangan dilakukan secara jalin-menjalin dengan proses pengamatan.
- b) Berusaha menemukan kesamaan dan perbedaan berkenaan dengan gejala sosial yang diamati, dan menemukan penyimpangan-penyimpangan pola-pola tindakan atau norma sosial tersebut.
- c) Membentuk taksonomi tindakan berkenaan dengan gejala sosial yang diamati.
- d) Menyusun secara tentatif proposisi-proposisi teoritis, berkenaan dengan hubungan antar kategori yang dikembangkan atau dihasilkan dari penyusunan taksonomi tersebut diatas.
- e) Melakukan pengamatan lebih lanjut terhadap tindakan sosial yang berkaitan dengan proposisi-proposisi sementara.
- f) Mengevaluasi proposisi teoritis untuk menghasilkan kesimpulan.
- g) Untuk mencegah penarikan kesimpulan secara subyektif, dilakukan upaya: (i) mengembangkan

intersubjektif melalui diskusi, (ii) menjaga kepekaan sosial dan kesadaran sebagai

